



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional kegiatan pemerintahan, laporan keuangan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Tujuan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan perundangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan.
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
2. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini secara berurutan dimuat uraian dan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Yang menguraikan mengenai hal-hal yang bersifat umum sebagai pengantar laporan keuangan. Pada bagian ini juga dimuat mengenai :

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

BAB II ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

Akan dijelaskan mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Banjar, Kebijakan Keuangan Daerah dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

- 2.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 2.2 Ekonomi Makro.



BAB VI

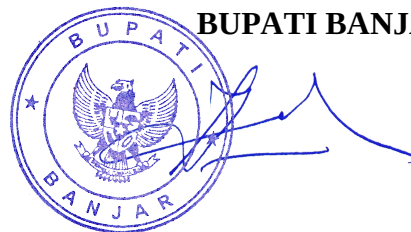
PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Laporan dengan penjelasan secara Naratif, Analisis atau Daftar Terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca Laporan dalam mengevaluasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Martapura, Juni 2020

BUPATI BANJAR,



H. KHALILURRAHMAN